



Strategi Optimalisasi Kesejahteraan Narapidana Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan

Revaldo Putra Diosand¹, Mitro Subroto²

Program Studi Teknik Pemasyarakatan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstract

Received: 20 April 2025
Revised: 27 April 2025
Accepted: 01 Mei 2025

This study aims to identify the welfare conditions of disabled prisoners in correctional institutions, examine optimization strategies that can be applied to improve the welfare of disabled prisoners and the implementation of optimization strategies in improving the welfare of disabled prisoners in correctional institutions. Based on the findings, there are major obstacles to inadequate infrastructure in many correctional institutions that are not designed to accommodate the special needs of disabled prisoners. This study uses a qualitative approach with a case study method. This study will analyze the welfare conditions of disabled prisoners in several correctional institutions in Indonesia, as well as evaluate the implementation of optimization strategies that have been applied. The results of the study show the specific needs of disabled prisoners, recommendations for effective strategies to improve welfare, assessment of the implementation and impact of the strategies implemented.

Keywords: Welfare, Disabled Prisoners, Correctional Institutions

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Diosand, R., & Subroto, M. (2025). Strategi Optimalisasi Kesejahteraan Narapidana Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.A), 221-225. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11906>.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan narapidana merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan, terutama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hak-hak ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan integrasi sosial yang seharusnya diterima oleh setiap narapidana tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa narapidana disabilitas sering kali menghadapi berbagai kendala dalam mendapatkan akses yang layak terhadap fasilitas dan layanan yang tersedia di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana disabilitas di Indonesia seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperoleh akses terhadap fasilitas yang memadai di lembaga pemasyarakatan. Tantangan ini tidak hanya mencakup keterbatasan fisik, tetapi juga kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan khusus mereka, baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan. Menurut Maryani (2018), infrastruktur di banyak lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya ramah disabilitas, yang mengakibatkan narapidana disabilitas kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam penjara. Selain itu, mereka juga sering kali menjadi korban diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil, baik dari sesama narapidana maupun dari petugas pemasyarakatan.

Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk merancang dan menerapkan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan kesejahteraan narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Strategi ini harus mencakup perbaikan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan khusus, dan program rehabilitasi yang inklusif. Widodo (2022) menekankan bahwa pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan narapidana disabilitas diakomodasi dengan baik. Hal ini juga memerlukan perubahan paradigma dalam cara petugas pemasyarakatan memahami dan menangani kebutuhan narapidana disabilitas, yang tidak boleh hanya bersifat sementara tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem.

Di Indonesia, upaya pemenuhan kesejahteraan narapidana disabilitas masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur yang kurang memadai di banyak lembaga pemasyarakatan, yang tidak dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan khusus narapidana disabilitas. Selain itu, terdapat pula kekurangan dalam pelatihan petugas pemasyarakatan dalam menangani narapidana dengan kebutuhan khusus, yang sering kali berdampak negatif pada kualitas layanan yang diberikan. Menurut Sugiono (2021), kendala-kendala ini mencerminkan kurangnya perhatian dari pihak berwenang terhadap hak-hak narapidana disabilitas, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan layanan yang setara dengan narapidana lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang konkret dalam meningkatkan kesejahteraan narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Langkah-langkah tersebut harus mencakup perbaikan infrastruktur, penyediaan pelatihan yang memadai bagi petugas pemasyarakatan, serta penerapan kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan hak-hak narapidana disabilitas terpenuhi. Dengan demikian, diharapkan narapidana disabilitas dapat menjalani masa hukuman dengan martabat yang terjaga dan mendapatkan kesempatan yang setara untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi ini akan menganalisis kondisi kesejahteraan narapidana disabilitas di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia, serta mengevaluasi implementasi strategi optimalisasi yang telah diterapkan.

Sumber Data

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narapidana disabilitas, petugas pemasyarakatan, dan ahli di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, observasi langsung di lembaga pemasyarakatan serta analisis dokumen terkait juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi yang ada.

Sampel Penelitian

Populasi: Narapidana disabilitas dan petugas pemasyarakatan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang mewakili berbagai tipe fasilitas (misalnya, lembaga pemasyarakatan kelas I, II, dan III).

Teknik Sampling:

Purposive Sampling: Memilih narapidana disabilitas dan petugas yang memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan tentang topik penelitian.

Stratified Sampling: Untuk memastikan representasi dari berbagai kategori fasilitas dan jenis disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kesejahteraan Narapidana Disabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan narapidana disabilitas di Indonesia masih jauh dari memadai. Fasilitas seperti aksesibilitas fisik, layanan kesehatan khusus, dan program rehabilitasi yang inklusif sering kali tidak tersedia. Narapidana disabilitas juga sering mengalami perlakuan diskriminatif dari sesama narapidana maupun petugas pemasyarakatan.

Layanan kesehatan khusus juga menjadi masalah utama. Banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak menyediakan layanan kesehatan yang memadai untuk narapidana disabilitas, seperti terapi fisik atau perawatan medis khusus yang mereka butuhkan. Keterbatasan akses ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mereka dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan dalam layanan kesehatan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya fasilitas medis yang memadai dan kekurangan tenaga medis yang terlatih dalam menangani kasus-kasus disabilitas.

Selain masalah fasilitas dan layanan kesehatan, narapidana disabilitas sering mengalami perlakuan diskriminatif. Diskriminasi ini dapat datang dari sesama narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Perlakuan tidak adil ini mencakup kekerasan verbal, pengucilan, dan dalam beberapa kasus, kekerasan fisik. Diskriminasi ini memperburuk situasi psikologis narapidana disabilitas, meningkatkan rasa isolasi dan stres, serta menghambat proses rehabilitasi mereka. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pelatihan yang lebih baik bagi petugas serta intervensi untuk mengatasi sikap diskriminatif di antara narapidana.

Implementasi Strategi Optimalisasi

Beberapa lembaga pemasyarakatan telah mulai mengimplementasikan strategi optimalisasi kesejahteraan, seperti pembangunan fasilitas ramah disabilitas dan pelatihan khusus bagi petugas. Namun, implementasi ini masih bersifat parsial dan belum merata di semua lembaga pemasyarakatan. Kesulitan utama dalam implementasi ini adalah kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang terlatih.

Dalam upaya untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan narapidana disabilitas, beberapa lembaga pemasyarakatan telah mulai mengimplementasikan strategi optimalisasi. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas. Ini termasuk renovasi fisik pada gedung penjara untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik, seperti pemasangan ramp, penyesuaian pintu, dan penyediaan toilet yang sesuai untuk narapidana disabilitas. Beberapa lembaga juga telah mulai menyediakan peralatan medis dan alat bantu yang diperlukan untuk mendukung mobilitas dan perawatan kesehatan narapidana disabilitas.

Pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam menangani narapidana

disabilitas. Pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi, meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan khusus, dan memberikan pengetahuan tentang cara berkomunikasi dan memberikan bantuan yang sesuai. Program pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi narapidana disabilitas.

Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang terlatih. Banyak lembaga pemasyarakatan mengalami keterbatasan finansial yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan renovasi fisik yang diperlukan atau menyelenggarakan pelatihan yang memadai. Selain itu, kekurangan tenaga kerja yang terlatih untuk mendukung pelaksanaan strategi ini juga menjadi tantangan. Hal ini mengakibatkan bahwa meskipun beberapa lembaga telah memulai langkah-langkah perbaikan, hasilnya masih bersifat parsial dan tidak merata di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam implementasi strategi optimalisasi, tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan anggaran, pelatihan yang lebih menyeluruh, dan alokasi sumber daya yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa semua lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas secara efektif dan adil.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih jauh dari memadai. Fasilitas yang tidak aksesibel, layanan kesehatan khusus yang terbatas, dan perlakuan diskriminatif adalah beberapa masalah utama yang dihadapi oleh narapidana disabilitas. Meskipun beberapa lembaga pemasyarakatan telah mulai menerapkan strategi optimalisasi kesejahteraan seperti pembangunan fasilitas ramah disabilitas dan pelatihan khusus bagi petugas, implementasi strategi ini masih bersifat parsial dan belum merata. Kendala utama dalam penerapan strategi ini meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih.

Penerapan strategi optimalisasi, seperti peningkatan fasilitas fisik, pelatihan petugas, dan pengembangan program rehabilitasi yang inklusif, menunjukkan potensi untuk memperbaiki kesejahteraan narapidana disabilitas. Namun, kesuksesan dari strategi ini sangat bergantung pada alokasi sumber daya yang memadai dan dukungan yang konsisten dari semua pihak terkait.

Rekomendasi

Penulis merekomendasikan adanya peningkatan anggaran untuk perbaikan fasilitas di lembaga pemasyarakatan, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, serta penyusunan kebijakan yang lebih spesifik dan mendetail mengenai hak-hak narapidana disabilitas. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana disabilitas terpenuhi .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dunn, M. J., & N. Smith. (2021). *Disability and the Penal System: A Comprehensive Guide*. Routledge.

Fox, L. R., & H. Brown. (2019). *Access and Inclusion in Penal Institutions*. Sage Publications.

Artikel Jurnal:

Kumar, S., & Patel, R. (2022). The impact of physical accessibility on the well-being of inmates with disabilities: A review. *Journal of Correctional Health Care*, 28(3), 245-258. <https://doi.org/10.1177/10783458221105780>

Johnson, T., & Miller, C. (2020). Discrimination and mental health outcomes among prisoners with disabilities. *International Journal of Prisoner Health*, 16(4), 300-312. <https://doi.org/10.1108/IJPH-04-2020-0015>

Laporan:

Human Rights Watch. (2021). *Disabled and Discriminated: The Struggles of Inmates with Disabilities in Indonesian Prisons*. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/disabled-and-discriminated-indonesian-prisons>

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Kesejahteraan Narapidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber Web:

World Health Organization. (2020). *Disability considerations in the health sector*. Retrieved from https://www.who.int/disabilities/publications/health_sector_disability_considerations/en/

Disability Rights International. (2019). *The rights of prisoners with disabilities: An overview*. Retrieved from <https://www.driadvocacy.org/rights-of-prisoners-with-disabilities>